

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi periviu tentang aspek *mandatory* dan *non-mandatory* yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Variabel aspek *mandatory* Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yaitu meliputi indikator: kompetensi SDM, pemahaman terhadap SAP, kecupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sedangkan variabel aspek *non-mandatory* meliputi indikator komitmen organisasi dan budaya organisasi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode angket (kuisisioner) yang berisi pertanyaan terstruktur. Populasi sejumlah 27 OPD di Kabupaten Purbalingga. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sensus (sample jenuh). Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala OPD dan Auditor Inspektorat Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel aspek *mandatory* dan aspek *non-mandatory* berpengaruh secara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Secara parsial, aspek *mandatory* berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan aspek *non-mandatory* secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Implikasi: Berdasarkan deskripsi tanggapan responden para periviu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purbalingga diharapkan memberikan perhatian lebih pada variabel aspek *non-mandatory* khususnya indikator komitmen organisasi yang berkaitan dengan item indikator komitmen kontinu para staf dan indikator budaya organisasi yang berkaitan dengan item indikator inovasi dan keberanian mengambil risiko staf dalam melaksanakan pekerjaan khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Kata Kunci: Aspek *Mandatory*, Aspek *Non-mandatory*.

SUMMARY

This study aims to analyze the perception of the process of mandatory and non-mandatory aspects that affect the quality of local government financial reports.

Mandatory aspect variables According to Law Number 15 of 2004 concerning Examination of Management and State Financial Responsibility, which includes indicators: HR competency, understanding of SAP, disclosure kiss, compliance with legislation and government internal control system (SPIP) while non-mandatory aspect variables include organizational commitment and organizational culture. The research data was collected by questionnaire method which contained structured questions. A population of 27 OPD in Purbalingga Regency. The sample is selected using the census method (saturated sample). Respondents in this study included the Head of OPD and Auditor District Inspectorate. The results of the study show that simultaneously the mandatory and non-mandatory aspects have a significant effect on quality local government financial reports. Partially, the mandatory aspects of significant influence on quality local government financial reports and non-mandatory aspects partially also have a significant effect on quality local government financial statements.

Implications: Based on the description of responses from respondents in the Regional Organization (OPD) of Purbalingga Regency, it is expected to pay more attention to the non-mandatory aspects variable, especially indicators of organizational commitment relating to indicators of staff's continuous commitment and organizational culture indicators related to indicators of innovation and courage to take risks in carrying out tasks / jobs, especially those related to quality local government financial reporting.

Keywords: *Mandatory Aspects, Non-mandatory Aspects.*